



PEMERINTAH  
KABUPATEN BENGKALIS

# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026



**SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN BENGKALIS**

**RENSTRA SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN 2021-2026**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya atas tercapainya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RENSTRA Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan disusun dengan berpedoman pada RPJMD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026 ini dirumuskan dengan tahapan, tata cara, serta pendekatan yang diatur dalam peraturan perundangan dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program/kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis yang sejalan dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis yaitu :“ **Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Berwarwah, Maju dan Sejahtera** ”. Dengan demikian Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis dalam mencapai tujuan pembangunan daerah pada khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya.

Disamping sebagai pedoman dalam perencanaan, Renstra ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis hingga pada saatnya nanti dapat terwujud Pemerintahan yang baik (*Good*


*Governance*). Pada akhirnya, semoga RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 ini menjadikan arah proses pembangunan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis lebih terarah.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu, kritikan yang konstruktif diperlukan guna penyempurnaan penyusunan Renstra yang lebih baik dimasa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan tenaga dan pemikiran dalam penyelesaian Renstra ini, diucapkan terima kasih. Semoga Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis yang kita cintai.

Bengkalis, Juli 2021

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN BENGKALIS



**RAFIARDHI IKHSAN, SSTP, M.Si**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19760312 199612 1 002

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II    GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ....	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	11
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	15
2.4. Tantangan dan Peluang .....	15
<b>BAB III   PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	19
3.2. Telaahan, Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	23
3.3. Penentuan Isu Strategis .....	30
<b>BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1. Tujuan .....	32
4.2. Sasaran .....	32
<b>BAB V     STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis .....	35
<b>BAB VI    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	
6.1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis .....	38

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

7.1. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis .....	48
--	----

**BAB VIII PENUTUP**

8.1. Kesimpulan.....	51
8.2. Kaidah Pelaksanaan.....	52



# PENDAHULUAN

---

## 1.1. Latar Belakang

Sebagai unsur Pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis Operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Hal ini tercermin pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang dengan sebaik-baiknya maka perlu disusun dokumen perencanaan, baik jangka menengah maupun tahunan, yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) ini merupakan hasil *breakdown* dari dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD).

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk: (1) Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (2) menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan; dan (3) memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Organisasi Perangkat Daerah secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan.

Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan



tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban perangkat daerah.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonoring, Tugas Pokok dan Fungsi Uraian Tugas Serta Tata Kerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD adalah: (1) pendekatan teknokratik yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan; dan (2) pendekatan partisipatif yaitu, melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan antara lain melalui forum perangkat daerah. Adapun tahapan dalam penyusunan Renstra-PD meliputi: (1) persiapan, (2) penyusunan rancangan awal, (3) penyusunan rancangan, (4) pelaksanaan forum perangkat daerah, (5) penyusunan rancangan akhir, dan (6) penetapan.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya terutama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra. Dalam penyusunan RPJMD terdapat uraian tentang analisis dan proyeksi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Kabupaten Bengkalis dalam lima tahun kedepan. Hal ini sangat penting menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Karena melalui proyeksi tersebut tertuang tantangan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis dalam mendorong peningkatan pelayanan. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis karena Renstra merupakan pedoman dalam perumusam Renja tahunan perangkat daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis dalam penyusunan Renstra Tahun 2021-2026 berpedoman kepada:



1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah & Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Nomor 0199/M PPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK 07/2010, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
24. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai penjabaran RPJMD untuk memberikan arah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, serta sebagai pedoman strategis dan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Menyediakan suatu acuan resmi bagi seluruh aparatur Sekretariat DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai APBD.

2. Menyediakan suatu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan Evaluasi Kinerja Tahunan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Sekretariat DPRD sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

##### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumberdaya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis.

##### **BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis, telaah terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah.

##### **BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan; sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.

**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan perangkat daerah.

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat.

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat tentang ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap bidang-bidang kewenangan.

**BAB VIII : PENUTUP**

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.



## GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

---

### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016, Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis mempunyai kedudukan sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberi dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 35 Tahun 2016, Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut.

#### **SEKRETARIS**

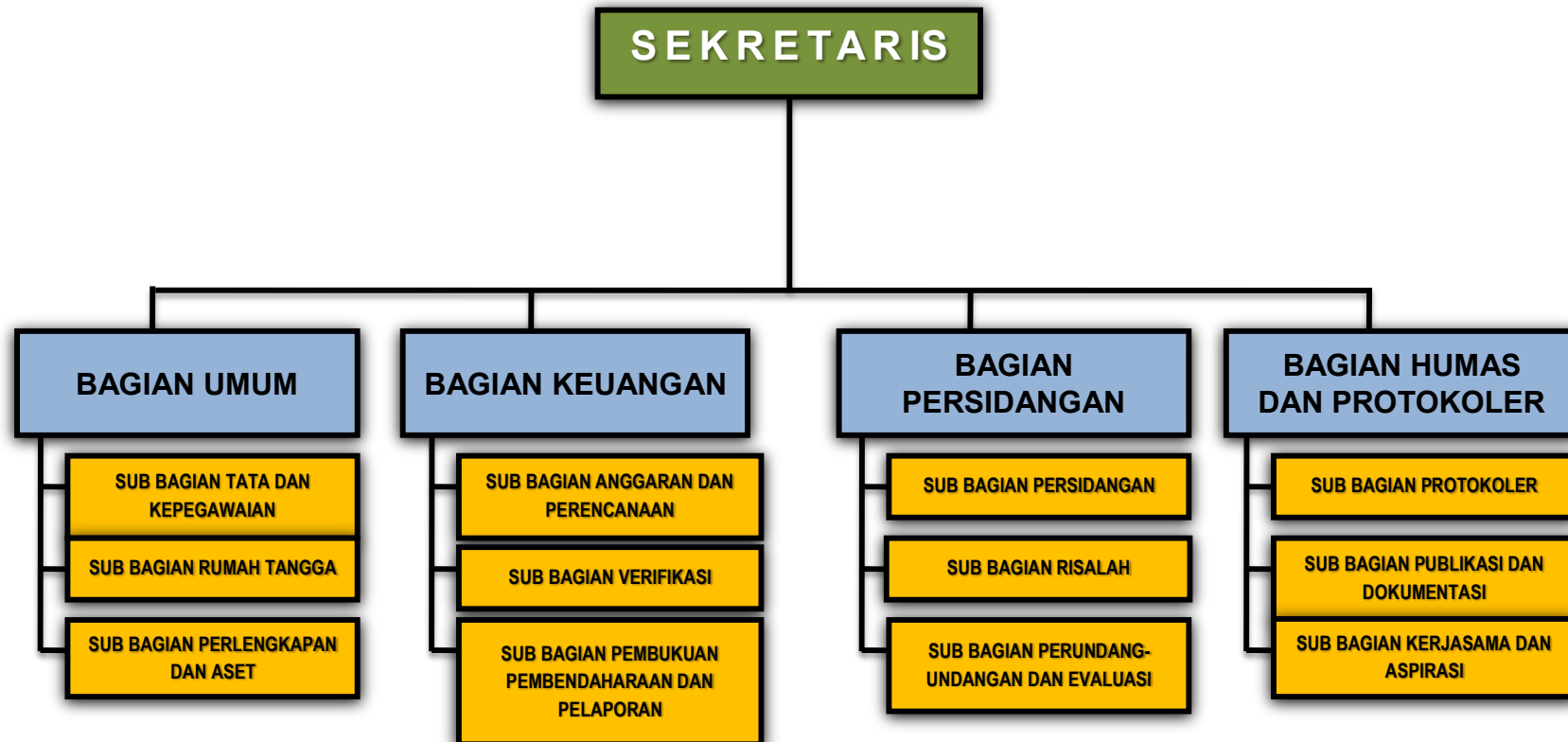
1. Sekretaris DPRD mempunyai tugas:
  - a. Memimpin dan menyelenggarakan administrasi, perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada bagian umum, bagian keuangan, bagian persidangan, bagian humas dan protokoler, dalam rangka mendukung dan melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi

DPRD secara menyeluruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi; dan
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.



## STRUKTUR ORGANISASI SEKRETAIAT DPRD KABUPATEN BENGKALIS



## 2.2. SUMBER DAYA SEKRETARIAT DPRD KAB. BENGKALIS

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumberdaya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

Untuk menunjang tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis, SDM yang ada cukup beragam. Secara keseluruhan jumlah SDM yang ada hingga tahun 2021 berjumlah 61 orang. Untuk lebih rinci, dapat digambarkan pada tabel-tabel dibawah ini.

**Tabel 2.1**  
Komposisi ASN  
Menurut Kelompok Umur

NO	UNIT KERJA	UMUR						
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50
1.	SEKRETARIS DEWAN						1	
2.	BAGIAN UMUM				3	7	3	1
3.	BAGIAN KEUANGAN				4	6	4	1
4.	BAGIAN PERSIDANGAN	1			8	4	2	3
5.	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER	1		2	3	4	4	3
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>		<b>2</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>8</b>

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis, Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata kelompok umur usia kerja ASN dilingkungan sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis dengan kelompok umur 20-25 berjumlah 2 orang, umur 31-35 berjumlah 2 orang, umur 36-40 berjumlah 18 orang, umur 41-45 berjumlah 11 orang, umur 46-50 berjumlah 14 orang dan umur lebih dari 50 tahun berjumlah 8 orang.

**Tabel 2.2**

Komposisi ASN Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis  
Menurut Golongan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN			
		I	II	III	IV
1.	SEKRETARIS DEWAN	-	-	-	1
2.	BAGIAN UMUM	1	10	4	3
3.	BAGIAN KEUANGAN	-	4	8	1
4.	BAGIAN PERSIDANGAN	-	8	7	1
5.	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER	-	7	6	-
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>29</b>	<b>25</b>	<b>6</b>

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis, Tahun 2021

Berdasarkan tabel 2.2 diatas, komposisi ASN berdasarkan golongan dilingkungan Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis terdiri dari Golongan IV berjumlah 6 orang, Golongan III berjumlah 25 orang, Golongan II berjumlah 29 orang dan Golongan I berjumlah 1 orang.

**Tabel 2.3**

Komposisi ASN  
Menurut Pendidikan Formal yang Ditamatkan

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN			
		S2	S1	Diploma	SMA
1.	SEKRETARIS DEWAN	1	-	-	-
2.	BAGIAN UMUM	-	5	1	10
3.	BAGIAN KEUANGAN	2	6	-	8
4.	BAGIAN PERSIDANGAN	-	4	-	10
5.	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER	-	6	1	13
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>31</b>

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis, Tahun 2021

Berdasarkan tabel 2.3 diatas, komposisi pendidikan ASN dilingkungan Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis dengan tamatan Sarjana S2/S1 berjumlah 24 orang, tamatan Diploma berjumlah 2 orang dan tamatan SMA berjumlah 31 orang

**Tabel 2.4**  
Komposisi ASN Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis  
Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1.	ESELON I	-	1	1
2.	ESELON II	-	3	3
3.	ESELON IV	2	8	10
4.	FUNGSIONAL TERTENTU ( AHLI DAN TERAMPIL)	-	-	-
5.	FUNGSIONAL PELAKSANA (STAF)	24	23	47
<b>TOTAL</b>		<b>26</b>	<b>35</b>	<b>61</b>

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis, Tahun 2021

Berdasarkan tabel 2.3 diatas, Komposisi jenis kelamin berdasarkan jabatan dilingkungan ASN Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis didominasi dengan ASN perempuan berjumlah 35 orang atau 57.38% dan ASN Laki-laki berjumlah 26 orang atau 42.62%.

**Tabel 2.5**  
Daftar Aset yang Dimiliki  
Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis

NO	NAMA/ JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
1.	TANAH BANGUNAN RUMAH NEGARA GOLONGAN III	6467 M2	Baik	RUMAH DINAS KETUA
2.	TANAH BANGUNAN RUMAH NEGARA GOLONGAN III	3340 M2	Baik	RUMAH DINAS WAKIL KETUA
3.	TANAH BANGUNAN GEDUNG KANTOR	9704 M2	Baik	KANTOR SEKRETARIAT DPRD
4.	JEEP	2 UNIT	BAIK	
5.	STATION WAGON	25 UNIT	BAIK	
6.	MICRO BUS	1 UNIT	BAIK	
7.	MINI BUS	1 UNIT	BAIK	
8.	SEPEDA MOTOR	37 UNIT	BAIK	
9.	PICK UP	2 UNIT	BAIK	
10.	TRAPPO 1.000 WATT	1 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD
11.	GENSET	7 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD
12.	P.C UNIT/KOMPUTER PC	23 UNIT	BAIK	
13.	LAPTOP	25 UNIT	BAIK	
14.	NOTE BOOK	5 UNIT	BAIK	
15.	PERSONAL KOMPUTER LAINNYA (APPLE)	1 UNIT	BAIK	

NO	NAMA/ JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
16.	PRINTER	34 UNIT	BAIK	
17.	SCANNER	1 UNIT	BAIK	
18.	PAPAN VISUAL/PAPAN NAMA	17 UNIT	BAIK	
19.	TELEVISI	28 UNIT	BAIK	
20.	SOUND SYSTEM	8 UNIT	BAIK	
21.	CAMERA VIDEO	16 UNIT	BAIK	
22.	HANDY CAM	4 UNIT	BAIK	
23.	ALAT STUDIO LAINNYA	56 UNIT	BAIK	
24.	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	41 UNIT	BAIK	
25.	CCTV-CAMERA CONTROL TELEVISION SYSTEM	4 UNIT	BAIK	
26.	PERALATAN STUDIO AUDIO LAINNYA	11 UNIT	BAIK	
27.	MESIN FOTOCOPY FOLIO	5 UNIT	BAIK	
28.	MESIN FOTOCOPY DOUBLE FOLIO	5 UNIT	BAIK	
29.	A.C SENTRAL	17 UNIT	BAIK	
30.	A.C WINDOW	36 UNIT	BAIK	
31.	A.C SPLIT	53 UNIT	BAIK	
32.	MEJA KERJA PEJABAT	16 UNIT	BAIK	
33.	KURSI KERJA PEJABAT	13 UNIT	BAIK	
34.	MEJA RAPAT	7 UNIT	BAIK	
35.	MEJA PODIUM	2 UNIT	BAIK	
36.	MEJA ½ BIRO	48 UNIT	BAIK	
37.	MEJA MAKAN BESI	14 UNIT	BAIK	
38.	KURSI RAPAT	14 UNIT	BAIK	
39.	KURSI TAMU	15 UNIT	BAIK	
40.	KURSI PUTAR	29 UNIT	BAIK	
41.	KURSI BIASA	31 UNIT	BAIK	
42.	LEMARI PENYIMPAN	14 UNIT	BAIK	
43.	FILLING CABINET BESI	11 UNIT	BAIK	
44.	BRANKAS	5 UNIT	BAIK	
45.	ALAT RUMAH TANGGA LAIN-LAIN	183 UNIT	BAIK	
46.	ALAT KESEHATAN OLAHRAGA LAINNYA	13 UNIT	BAIK	
47.	TENDA	11 UNIT	BAIK	

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis, Tahun 2020

Keberadaan sarana dan prasarana sangatlah penting dalam mendukung, menunjang dan memfasilitasi tugas dan fungsi serta pencapaian target yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel 2.5 diatas, daftar aset yang dimiliki Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis inventaris pada tahun 2020 dalam kondisi baik.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kinerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai fasilitator dari tugas pokok dan fungsi DPRD ukuran keberhasilan kinerjanya berdasarkan tingkat keberhasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya.

### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Analisis Lingkungan Internal**

#### *Kekuatan (Strengths)*

Pada sisi kekuatan terdapat faktor-faktor strategis antara lain :

1. Mempunyai SOTK yang Sudah Jelas
2. Tersedianya peraturan perundang-undangan tentang kedudukan, susunan organisasi, eselonering, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis.
3. Terdapatnya jumlah aparatur yang memadai
4. Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
5. Eksistensi Lembaga Sekretariat DPRD sebagai bagian dari manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai penghubung antara legislatif dan eksekutif untuk penentu

#### *Kelemahan (Weaknesses)*

Pada sisi kelemahan terdapat faktor-faktor strategis antara lain :

1. Belum optimalnya sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan dukungan yang baik, profesional

dan handal serta mampu mendeteksi dini terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.

2. Belum tersedianya sarana teknologi informasi
3. Kemampuan Sumber Daya Aparatur dalam memanfaatkan teknologi informasi
4. Belum adanya SOP Pelayanan DPRD

### **Analisis Lingkungan Eksternal**

Peluang (*Opportunities*)

Pada sisi Peluang terdapat faktor-faktor strategis antara lain :

1. Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
2. Penggunaan teknologi informasi yang memadai dan modern

Ancaman/Tantangan (*Threats*)

Pada sisi kelemahan terdapat faktor-faktor strategis antara lain :

1. Adaptasi dewan terhadap perubahan regulasi
2. Masih terdapatnya kendala dalam proses koordinasi dengan dinas terkait, hal ini bisa menjadi hambatan untuk pencapaian indikator ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan khususnya.



**TABEL. 2.3 PENCAPAIAN KINERJA ANGGARAN  
SEKRETARIAT DPRD KAB. BENGKALIS**

NO	URAIAN	ANGGARAN TAHUN					REALISASI ANGGARAN TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8,434,210,800	9,501,898,700	14,548,117,768	16.405.515.000	14.831.129.899	5,696,927,647	7.548.656.444	13.157.923.166	15.046.374.908	13.962.533.662
2.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	9,553,295,100	9,086,470,100	14.193.095.200	13.224.895.000	7.214.505.000	5.287.006.682	5.485.912.211	11.455.150.956	12.265.370.491	7.262.039.924
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	492,000,000	539,900,000	566,600,000	1.209.600.000	518.320.000.	466,096,500	526,925,000	518,625,000	1.118.775.000	438.895.000
4	Program peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	1,584,000,000	2,300,000,000	1,765,000,000	3,000,000,000	2.055.000.000	1,541,914,715	1,625,468,263	1,685,702,045	2,444,310,437	1.688.694.208
5	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	52,125,400	79,000,000	88,203,432	249.477.300	176.600.000	42.203.470	72,121,500	87,200,620	211,121,610	130,780,300
6.	Program Peningkatan Kapasitas Lemabaga Perwakilan Rakyat Daerah	51.042.771.291	39.305.637.841	36.646.115.548	49.474.668.449	51.729.849.226	22.813.907.685	26.573.762.728	31.774.006.781	46.141.221.619	46.844.798.758

## B A B

## 3

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapainya dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja dimasa lalu, dapat dirumuskan permasalahan utama Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis adalah **"belum optimalnya kinerja Sekretariat Dewan dalam melaksanakan tugas-tugas Kedewanan"**, yang tergambar dari data yang menunjukkan bahwa kinerja DPRD belum optimal dalam menjalankan fungsi utama kedewanan, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Permasalahan utama tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain:

1. Belum Optimalnya produk-produk kedewanan yang dihasilkan
2. Kurangnya Pemanfaatan Kemajuan Informasi Teknologi
3. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya Sekretariat DPRD

Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan kesadaran bahwa: (1) Masih rendahnya kompetensi aparat; (2) Masih lemahnya koordinasi dengan unit kerja, OPD terkait dan para mitra lainnya; (3) Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kualitas kinerja pegawai.

4. Belum maksimalnya inovasi pelayanan dukungan fasilitas terhadap tugas kedewanan yang berbasis teknologi informasi. Permasalahan ini dapat dilihat dari: (1) Data base kedewanan yang bersifat fungsi kedewanan, yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan yang belum optimal; (2) Adanya penyampaian aspirasi asyarakat yang belum optimal tertampung; (3) Belum lengkapnya prosedur operasi baku (*standard operating procedure*).

Dengan demikian, permasalahan dalam pelayanan Sekretariat DPRD lebih kepada permasalahan internal dan eksternal sebagai penyebabnya. Permasalahan utama dan permasalahan pelayanan perangkat daerah sebagaimana dikemukakan di atas dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1.  
**Kerangka Permasalahan Pelayanan  
 Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis**



Keberhasilan kinerja DPRD sangat tergantung pada peran Sekretariat DPRD dalam memberikan fasilitasi pelayanan dukungan untuk tugas-tugas kedewanan dalam menjalankan fungsi sebagai legislasi, anggaran dan pengawas. Peningkatan kinerja Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas fasilitasi merupakan faktor terpenting. Hal ini membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap dan kesadaran peran Sekretariat DPRD sehingga dapat memperlancar tugas kedewanan dalam menjalankan 3 fungsi tersebut dalam rangka mewujudkan kinerja anggota DPRD.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD adalah memberikan dukungan pelayanan fasilitasi (*customer service*) yang baik kepada Anggota DPRD. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepuasan kepada Anggota DPRD. Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan untuk memenuhi keinginan pelanggan, selain itu dapat dinilai berdasarkan persepsi konsumen yang membandingkan harapan untuk menerima layanan dan pengalaman sebenarnya atas layanan yang diterima.

Di samping itu, kemampuan aparatur/petugas dalam menyusun prosedur maupun memberikan pelayanan serta menerapkan aturan sangat perlu ditingkatkan. Ketidaksiplinan aparat dalam melayani harus dihilangkan. Kesan kesewenangan ini terlihat bisa saja terjadi karena banyak hal, seperti: birokrasi yang masih tidak teratur, masih kentalnya perasaan sebagai pegawai negeri sipil (ASN) yang merasa dilayani bukan melayani.

Banyak terdapat kendala-kendala yang dialami oleh Sekretariat DPRD sehingga tidak dapat memberikan pelayanan yang prima kepada Anggota DPRD, misalnya :

- a. Kurangnya komitmen dari aparatur pelayanan
- b. Kurangnya pemahaman tentang manajemen kualitas
- c. Ketidakmampuan merubah Kultur & Perilaku
- d. Kurang akuratnya perencanaan yang berkualitas
- e. Kurang efektifnya program pengembangan SDM
- f. Keterbatasan sumber-sumber lainnya
- g. Penerapan sistem manajemen kualitas belum efektif
- h. Berorientasi jangka pendek
- i. Sistem informasi kinerja pelayanan belum optimal dikembangkan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan rumusan permasalahan dan akar masalah pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis sebagai berikut.

Tabel 3.1  
**Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah  
Sekretariat DPRD Daerah Kabupaten Bengkalis**

Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya produk-produk kedewanan yang dihasilkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum efektifnya penyusunan rencana pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan</li> <li>• Masih lemahnya koordinasi dengan OPD maupun bagian hukum</li> </ul>
Belum optimalnya Kualitas dan kuantitas sumber daya Sekretariat DPRD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya kompetensi aparat</li> <li>• Masih lemahnya koordinasi dengan unit kerja, OPD terkait dan para mitra lainnya</li> <li>• Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kualitas kinerja Pegawai</li> </ul>
Kurangnya Pemanfaatan Kemajuan Informasi Teknologi ( IT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum efektifnya koordinasi pelayanan dengan pihak terkait</li> <li>• Masih rendahnya kemampuan SDM aparat dalam bidang teknologi informasi</li> <li>• Masih terbatasnya kemampuan anggaran dalam memberikan sistem pelayanan</li> </ul>

Tabel 3.2

**Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah  
Dalam Pelayanan Fasilitasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis**

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Produk-produk Kedewanan	Belum optimalnya produk-produk kedewanan yang dihasilkan tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum efektifnya penyusunan rencana pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan</li> <li>• Masih lemahnya koordinasi dengan OPD maupun bagian hukum</li> </ul>
Kompetensi SDM	Belum optimalnya Kualitas dan kuantitas sumber daya Sekretariat DPRD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya kompetensi aparat</li> <li>• Masih lemahnya koordinasi dengan unit kerja, OPD terkait dan para mitra lainnya</li> <li>• Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kualitas kinerja Pegawai</li> </ul>
Inovasi Pelayanan fasilitasi	Belum maksimalnya inovasi pelayanan fasilitasi yang berbasis teknologi informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum efektifnya koordinasi pelayanan dengan pihak terkait</li> <li>• Masih rendahnya kemampuan SDM aparat dalam bidang teknologi informasi</li> <li>• Masih terbatasnya kemampuan keuangan daerah</li> </ul>

Kondisi kinerja yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis adalah memberikan pelayanan yang prima kepada anggota DPRD dan masyarakat serta meningkatkan kinerja DPRD dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi pegawai yang memiliki kompetensi artinya mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan secara proporsional, mengenali permasalahan yang dihadapi dan dapat memecahkan permasalahan dengan baik dan tuntas. Ini berarti setiap aparat harus dapat meningkatkan potensi dan kapasitas kerja dengan ketekunan melaksanakan tugas, mendalami pelaksanaan tugas serta menambah pengalaman/wawasan. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang jelas artinya adanya kejelasan dalam merumuskan tugas-tugas dan kewenangan dari suatu organisasi dan tidak terjadi tumpang tindih, pelaksanaan tugas serta adanya prosedur dan tata kerja yang jelas.

Adanya dukungan sarana dan prasarana dan dukungan pendanaan yang memadai untuk memperlancar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan kinerja pelayanan OPD kepada Anggota DPRD dan masyarakat. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan, sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra yang telah disusun sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan anggaran agar terjalin keselarasan antara kebutuhan dan kemampuan serta potensi

masalah layanan fasilitasi sehingga terjadi adanya sinergitas antara perencanaan yang dibuat dengan pelaksanaannya.

### 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama 5 (lima) tahun ke depan. *Impact* pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (*high level indicators*) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi menjadipenting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Visi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah ***“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, Maju dan Sejahtera”***

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam memajukan Perekonomian.
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter.
3. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Dari rumusan visi dan misi tersebut, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan, yaitu: Peningkatan kualitas layanan



pemerintahan menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter.

Salah satu komponen dari perencanaan strategis adalah tujuan dan sasaran pembangunan yang mengacu pada pernyataan visi dan misi. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan selama periode perencanaan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan. Adapun tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 yang terkait dengan Sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**TABEL 3.2.1**  
**VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH**  
**KABUPATEN BENGKALIS 2021-2026**

No	Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>Visi RPJMD: “Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, Maju dan Sejahtera”.</b>											
<b>Misi ke-2: “Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter”.</b>											
2.1	Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik.		Indek Reformasi Birokrasi	70	75	80	82.5	85	87.5	90	90
	2.1.1	Meningkatnya kualitas reformasi Birokrasi pada Penyelenggaraan pemerintah.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	B	BB	BB	BB	A	A	A	A
			Indek Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE)	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	2.8	2.8
			Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	85	86	87	90	95	95	95
	Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan Harmonis.		Persetase Penyelesaian Konflik Keagamaan	72%	65%	60%	55%	50%	45%	40%	40%
2.2	2.2.1	Terwujudnya nilai-nilai agama dan budaya melayu.	Persetase Penyelesaian Konflik Keagamaan	72%	65%	60%	55%	50%	45%	40%	40%
			Persetase Pemajuan Kebudayaan Melayu	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%

	2.2.2.	Terwujudnya peran serta pemuda mendukung prestasi olah raga dan pencegahan penyalahgunaan narkoba.	Angka Prestasi olah raga	11	13	15	16	20	25	30	30
			Jumlah Penurunan Penghuni Tindak Pidana Narkoba Lapas kelas II A Bengkalis	1085	900	850	800	750	700	650	650
	2.2.3.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender	90.07	90.5	90.75	91	91.5	92	92.1	92.1

**Tabel 3.2.2**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**  
**KABUPATEN BENGKALIS 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>VISI: “ Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Yang Bermarwah, Maju Dan Sejahtera”</b>				
<b>MISI 2: Mewujudkan Reformasi Birokrasi Serta Penguatan Nilai-Nilai Agama Dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Masyarakat Yang Berkarakter</b>				
2.1. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik.	2.1.1. Meningkatnya kualitas reformasi Birokrasi pada penyelenggaraan pemerintahan.	2.1.1.1. Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah.	2.1.1.1.1. Penguatan pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan.	2.1.1.1.1.1. Sinergitas perencanaan pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan.
			2.1.1.1.2. Peningkatan Pengendalian dan evaluasi serta pengawasan berjenjang dalam pelaksanaan kegiatan.	2.1.1.1.2.1. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi serta pengawasan berjenjang dalam pelaksanaan kegiatan.
		2.1.1.2. Indek Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE).	2.1.1.2.1. Penguatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada penyelenggaraan pemerintahan.	2.1.1.2.1.1. Menyedaikan Kebijakan, Tatakelola dan Mengembangkan Layanan Teknologi Informasi dan komunikasi yang terintegrasi.

		2.1.1.3. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM).	2.1.1.3.1. Penguatan pelayanan publik yang efektif, efisien, professional.	2.1.1.3.1.1. Restrukturisasi dan penataan Organisasi Perangkat Daerah yang berazaskan kelayakan, efektif dan efisien.
				2.1.1.3.1.2. Mengembangkan inovasi dan kualitas pelayanan kependudukan dan Non Kependudukan.
			2.1.1.3.2. Penguatan sistem penempatan pegawai sesuai dengan kualifikasi dan capaian kinerja.	2.1.1.3.2.1. Meningkatkan kompetensi aparatur dengan pendidikan dan pelatihan yang profesional dan terukur hasilnya.
2.2. Mewujudkan masyarakat yang berkarakter dan harmonis.	2.2.1. Terwujudnya nilai nilai agama dan budaya melayu.	2.2.1.1. Persetase Penyelesaian Konflik Keagamaan.	2.2.1.1.1. Penguatan peran dan partisipatif agamawan dan kelompok-kelompok masyarakat.	1.2.1.1.1.1. Mengoptimalkan kapasitas pendidik agama, pendakwah dan pemuka kelompok-kelompok masyarakat di semua level.
		2.2.1.2. Persetase Pemajuan Kebudayaan Melayu.	2.2.1.2.1. Introduksi nilai-nilai budaya melayu pada dunia pendidikan.	2.2.1.2.1.1. Mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai budaya melayu pada kurikulum muatan lokal di jenjang usia dini, dasar dan lanjut.
			2.2.2.2.1. Pelestraian peninggalan sejarah kebudayaan melayu.	2.2.2.2.1.1. Melaksanakan pemeliharaan yang berkesinambungan terhadap bangunan dan benda cagar budaya (BCB) bersitus kebudayaan melayu.

			2.2.2.1.3. Penguatan sinergi pemajuan kebudayaan melayu dengan lembaga pendidikan tinggi, lembaga adat, penggiat seni, budaya dan elemen lainnya.	2.2.2.1.3.1. Melaksanakan peningkatan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi, lembaga adat, penggiat seni, budaya dan elemen lainnya.
2.3.1. Terwujudnya peranserta pemuda mendukung prestasi olahraga dan pencegahan penyalahgunaan narkoba.	2.3.1.1. Angka Prestasi olahraga.	2.3.1.1.1. Peningkatan kualitas atlet muda pada cabang olah raga prestasi		2.3.1.1.1.1. Menyiapkan sarana dan prasarana keolahragaan dan pembinaan yang berkesinambungan sesuai dengan standard nasional.
	2.3.1.2. Jumlah Penghuni Tindak Pidana Narkoba Lapas kelas II A Bengkalis.	2.31.2.1. Penguatan kinerja pencegahan penyalahgunaan narkoba pada generasi muda.		2.3.1.2.1.1. Revitalisasi kelembagaan serta peran dan fungsi Badan Nasional Narkotika Kabupaten (BNKK). 2.3.1.2.1.2. Melaksanakan peningkatan kapasitas kelompok-kelompok dan organisasi kepemudaaan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.
2.3.2. Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan.	2.3.2.1. Indek Pembangunan Gender.	2.3.2.1.1. Penguatan agenda perempuan berdaya keluarga sejahtera.		2.3.2.1.1.1. Fasilitasi peran perempuan pada peningkatan kesejahteraan keluarga dan pembangunan karakter masyarakat.

### 3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil telaah terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, kebijakan nasional, Visi-Misi Kepala Daerah, maka isu strategis dalam peningkatan kinerja layanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Produk-Produk Kedewanan Tepat Waktu.

Seiring dengan meningkatnya peningkatan kompetensi anggota DPRD melalui bimtek diharapkan anggota DPRD dapat meningkatkan kualitas produk-produk kedewanan yang tepat waktu. Target ini sangat dibutuhkan agar masyarakat mendapatkan kepastian dalam merealisasi aspirasi dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah bagi kesejahteraan masyarakat. Upaya peningkatan kualitas produk-produk kedewanan dapat dilakukan dengan cara mencakup sistem dan mekanisme kerja dan membenahi di bidang fasilitasi pelayanan yang harus dimulai dari aspek yang paling besar yaitu pola pikir, pola tindak, serta ketangguhan dalam bekerja.

2. Peningkatan Sumberdaya Perangkat Daerah

Paradigma masyarakat terhadap sulitnya menyampaikan aspirasi masih ada. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur Sekretariat DPRD serta ketersediaan sarana dan prasarana yang representatif perlu mendapat perhatian yang serius. Disamping itu, masyarakat harus diberikan kepercayaan bahwa aspirasi yang disampaikan adalah benar-benar untuk memajukan pembangunan daerah.

Untuk mengantisipasi isu strategis ini, langkah-langkah yang harus ditempuh Sekretariat DPRD antara lain adalah:

- a. Membentuk aparat yang profesional yang disiplin dan kompetensi
- b. Membentuk aparat yang transparan, yaitu setiap aparat harus bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Membentuk aparat yang akuntabel, artinya aparat harus bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya.

3. Peningkatan Produktivitas Pelayanan yang Berbasis Teknologi Informasi

Prinsip-prinsip pelayanan publik adalah kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan dan kenyamanan. Oleh karena itu Sekretariat DPRD harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas



pelayanan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan anggota DPRD dan masyarakat. Selain peningkatan kualitas kemampuan teknis aparatur dan perbaikan infrastruktur, penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat menjadi tuntutan masyarakat dewasa ini.

## TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi maka Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis dalam lima tahun ke depan akan menjalankan segenap penyelenggaraan pelayanan dengan tujuan yaitu “*Optimalisasi kinerja Sekretariat DPRD secara prima*”.

### 4.2 Sasaran

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan 3 (tiga) sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan, yakni:

1. Meningkatnya kualitas produk-produk kedewanan, dengan indikator sasaran adalah:
  - ✓ Prosentase produk kedewanan yang dihasilkan tepat waktu
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan:
  - ✓ Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah, dengan indikator sasaran adalah:
  - ✓ Nilai SAKIP Sekretariat DPRD
  - ✓ Persentase ASN dengan nilai SKP Kategori Baik

- ✓ Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Pada tahun 2021 Sekretariat DPRD menyusun Renstra 2021-2026 sesuai dengan RPJMD, Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi maka Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis dalam lima tahun ke depan akan menjalankan segenap penyelenggaraan urusan kesekretariatan DPRD dengan tujuan yaitu **“Meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD secara prima “**

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan 3 (tiga) sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan, yakni:

1. Meningkatnya kualitas produk-produk kedewanan, dengan indikator sasaran adalah:
  - ✓ Prosentase produk kedewanan yang dihasilkan tepat waktu
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan, dengan indikator sasaran adalah:
  - ✓ Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan Dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah, dengan indikator sasaran adalah:
  - ✓ Nilai SAKIP Sekretariat DPRD
  - ✓ Persentase ASN dengan nilai SKP Kategori Baik

Hubungan antara tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 serta target-target yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
 Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis  
 Tahun 2021-2026**

Visi RPJM menjadi Visi OPD Sekwan : Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, Maju dan Sejahtera										
Misi RPJMD menjadi Mis OPD Sekwan : Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter										
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Tahun Awal 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD secara prima	Meningkatnya kualitas produk-produk kedewanan	Prosentase produk kedewanan yang dihasilkan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan	Prosentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan Dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD		B	B	BB	BB	BB	BB	A
		Persentase ASN dengan nilai SKP Kategori Baik		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## B A B

## 5

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1 Strategi dan kebijakan Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD adalah strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah OPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis 2021-2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**  
**Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Optimalisasi Kinerja Sekretariat DPRD secara Prima	Meningkatnya Kualitas Produk Kedewanan	Peningkatan kemampuan anggota DPRD	1. Mengoptimalkan kemampuan anggota DPRD .
		Peningkatan kualitas pelayanan publik	2. Menciptakan sarana pelayanan yang sesuai standar pelayanan prima
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan	Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelayanan	
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan akuntabilitas layanan Sekretariat DPRD	3. Meningkatkan transparansi layanan Sekretariat DPRD
		Peningkatan kualitas SDM Aparatur	4. Menyiapkan aparatur yang profesional, cakap, dan berintegritas

B A B  
6

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

## 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja pada setiap tingkatan. Arsitektur kinerja dapat digambarkan dalam bentuk pohon kinerja sebagai berikut:

Gambar 6.1.  
**Arsitektur Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah (eselon II).



Sedangkan pencapaian outcome suatu program menjadi tanggung jawab kepala bidang/kepala bagian (eselon III). Sementara untuk pencapaian output kegiatan menjadi tanggung jawab kepala subbidang/kepala subbagian. Adapun staf pelaksana bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan (input dan proses).

Rencana Program Kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis pada prinsipnya merupakan kegiatan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis.

Dalam upaya merealisasikan visi, misi, tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan Kabupaten Bengkalis yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026, dengan tetap mengacu pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis untuk 5 (lima) tahun ke depan, telah ditetapkan beberapa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara bertahap dari tahun 2021 sampai akhir tahun 2026.

Adapun berbagai program dan kegiatan yang akan direncanakan dan sekaligus dilaksanakan, didasarkan atas sejauhmana peran dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis, dalam rangka mendukung secara optimal pelaksanaan tugas DPRD Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai unsur Pemerintahan Daerah untuk bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis guna mewujudkan visi dan misi “Mewujudkan Masyarakat yang produktif, yang berkarakter, kearifan local menuju Bengkalis yang Maju dan Sejahtera”.

Program dan kegiatan indikatif Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis untuk tahun 2021 sampai 2026 yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) ini dikelompokkan menjadi program penunjang urusan pemerintahan dan program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Adapun program tersebut adalah sebagai berikut

#### **A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

- 1) Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD
- e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
  - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Pengadaan Mebel
  - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
  - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan.
  - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - c. Pemeliharaan Mebel
  - d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya.

**B. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**

- 9) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
  - a. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
  - b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
  - c. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
- 10) Layanan Administrasi DPRD
  - a. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
- 11) Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
  - a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
  - b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
- 12) Pembahasan Kebijakan Anggaran
  - a. Pembahasan KUA dan PPAS
  - b. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
  - c. Pembahasan APBD
  - d. Pembahasan APBD Perubahan
- 13) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
  - a. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
  - b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
  - c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
  - d. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
  - e. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
- 14) Peningkatan Kapasitas DPRD
  - a. Bimbingan Teknis DPRD
  - b. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
  - c. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
  - d. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
  - e. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
- 15) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
  - a. Pelaksanaan Reses
- 16) Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
  - a. Pengawasan Kode Etik DPRD
- 17) Fasilitasi Tugas DPRD
  - a. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
  - b. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Perhitungan pagu anggaran program dan kegiatan pada tahun pertama Renstra Sekretariat DPRD dilakukan dengan menentukan output setiap kegiatan kemudian menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program. Untuk pagu anggaran program dan kegiatan pada tahun berikutnya sampai dengan tahun ke-5 (Kelima) diperhitungkan dengan pagu indikatif dengan asumsi kenaikan sebesar 1,5 – 3% dari tahun sebelumnya. Rencana program, kegiatan dan pendanaan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL T- C27 (6.1)  
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN BENGKALIS

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA OPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025					TAHUN 2026	
							TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)				TARGET	(Rp)
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																					
			4																		
			4.02		SEKRETARIAT DPRD		98.703.101.831	99.555.396.151	101.178.876.751	102.473.655.200	103.786.632.951	107.093.287.151									
			4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan perangkat daerah yang dilaksanakan di Sekretariat DPRD	56.260.768.169	56.746.975.806	57.671.959.748	58.409.983.464	59.156.380.782	61.043.179.376									
						100%															
1	Meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Secara Prima	3.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan Dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah				1. Nilai SAKIP Sekretariat DPRD		BB	BB	BB	BB	A									
						2. Persentase AGR dengan nilai SKP Kategori Baik		100%	100%	100%	100%	100%									
			4.02.01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja PD yang tersedia	412.534.499	574.234.499	574.234.499	588.234.499	588.234.499	598.234.499						(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS		
			4.02.01	2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.000.000	241.700.000	241.700.000	245.700.000	245.700.000	245.700.000						(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS		
			4.02.01	2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	72.534.499	72.534.499	72.534.499	82.534.499	82.534.499	82.534.499						(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS		
			4.02.01	2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	87.000.000	87.000.000	87.000.000	87.000.000	87.000.000	87.000.000						(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS		
			4.02.01	2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	98.000.000	25 kali	98.000.000	98.000.000	98.000.000	98.000.000						(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS		
			4.02.01	2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000						(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS		
			4.2.1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang menerima Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.700.000.000	62 Orang	8.700.000.000	8.700.000.000	8.700.000.000	8.700.000.000						(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS		
			4.2.1	2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8.700.000.000	63 Orang	8.700.000.000	8.700.000.000	8.700.000.000	8.700.000.000						(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS		
			4.2.1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.700.000.000	60 Dokumen	1.700.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000						(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS		
			4.2.1	2.03.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.700.000.000	60 Orang	1.700.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000						(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS		
			4.2.1	2.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	500.000.000	75 Orang	500.000.000	600.000.000	500.000.000	500.000.000						(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS		
			4.02.01	2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	500.000.000	61 Orang	500.000.000	600.000.000	500.000.000	500.000.000						(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS		
			4.02.01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum Perangkat daerah	4.106.000.000	6 Gedung	4.206.000.000	4.421.343.942	4.621.343.942	4.951.343.942						(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS		
			4.02.01	2.06.01	Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100.000.000	12 Item	100.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000						(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS		
			4.02.01	2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100.000.000	69 Item	100.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000						(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS		

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, KANTOR yang Disediakan	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN	TARGET KINERJA								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRODE RENSTRA	UNIT KERJA OPD PENANGGUNG	LOKASI				
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024					TAHUN 2025		TAHUN 2026	
			4 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		700 Paket	3.056.000.000	700 Orang	3.156.000.000	700 Paket	3.021.343.942	700 Paket	3.121.343.942	700 Paket	3.451.343.942	700 Paket	4.151.343.942	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS	
			4 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan		20 Paket	150.000.000	20 Item	150.000.000	20 Paket	200.000.000	20 Paket	200.000.000	20 Paket	200.000.000	20 Paket	200.000.000	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS	
			4 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		375 Dokumen	200.000.000	170 media/loran	200.000.000	375 Dokumen	350.000.000	375 Dokumen	350.000.000	375 Dokumen	350.000.000	375 Dokumen	450.000.000	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS	
			4 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		300 Laporan	500.000.000	655 kali	500.000.000	300 Laporan	550.000.000	300 Laporan	650.000.000	300 Laporan	650.000.000	300 Laporan	750.000.000	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS	
			4 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		20 Paket	350.000.000	20 Paket	350.000.000	20 Paket	750.000.000	20 Paket	450.000.000	20 Paket	500.000.000	20 Paket	800.000.000	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS	
			4 02 01 2.07 01	Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Unit	0	4 Unit	0	Unit	300.000.000	Unit	0	Unit	0	Unit	0	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS	
			4 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		4 Unit	150.000.000	5 Item	150.000.000	4 Unit	150.000.000	4 Unit	150.000.000	4 Unit	150.000.000	4 Unit	250.000.000	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS	
			4 02 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		12 Unit	200.000.000	12 Unit	200.000.000	12 Unit	300.000.000	12 Unit	300.000.000	12 Unit	350.000.000	12 Unit	550.000.000	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS	
			4 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Laporan	808.760.000	12 Laporan	908.760.000	12 Laporan	918.800.000	12 Laporan	908.760.000	12 Laporan	1.017.157.318	12 Laporan	1.117.157.318	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS	
			4 02 01 2.08 01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat		1765 Laporan	30.000.000	1820 Surat 1 Orang	30.000.000	1765 Laporan	50.000.000	1765 Laporan	30.000.000	1765 Laporan	30.000.000	1765 Laporan	30.000.000	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS	
			4 02 01 2.08 02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	500.000.000	12 Kali	600.000.000	12 Laporan	600.000.000	12 Laporan	600.000.000	12 Laporan	708.397.318	12 Laporan	808.397.318	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS	
			4 02 01 2.08 04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		14 Laporan	278.760.000	14 Orang	278.760.000	14 Laporan	268.800.000	14 Laporan	278.760.000	14 Laporan	278.760.000	14 Laporan	278.760.000	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS	
			4 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung yang terpelihara		2 Gedung	4.863.527.363	6 Gedung	4.987.635.000	6 Gedung	4.987.635.000	6 Gedung	4.987.635.000	6 Gedung	4.937.635.000	6 Gedung	5.137.635.000	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS	
			4 02 01 2.09 01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS	
			4 02 01 2.09 02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan		27 Unit	983.650.000	27 Unit	983.650.000	27 Unit	983.650.000	27 Unit	983.650.000	27 Unit	983.650.000	27 Unit	983.650.000	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS	
			4 02 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		20 Unit	53.985.000	8 kali	53.985.000	20 Unit	53.985.000	20 Unit	53.985.000	20 Unit	53.985.000	20 Unit	53.985.000	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS	
			4 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit	800.000.000	16 Item	800.000.000	Unit	800.000.000	Unit	800.000.000	Unit	800.000.000	Unit	800.000.000	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS	
			4 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		6 Unit	2.475.892.363	118 Orang 100 %	2.600.000.000	6 Unit	2.600.000.000	6 Unit	2.600.000.000	6 Unit	2.600.000.000	6 Unit	2.600.000.000	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS	
			4 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		6 Unit	500.000.000	12 kali 12 kali 100 %	500.000.000	6 Unit	500.000.000	6 Unit	500.000.000	6 Unit	450.000.000	6 Unit	650.000.000	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS	
			4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang Menerima Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		45 Orang	32.919.946.307	45 Orang	32.919.946.307	45 Orang	32.919.946.307	45 Orang	33.754.010.023	45 Orang	34.054.010.023	45 Orang	34.304.010.023	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS	
			4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		45 Orang	32.184.946.307	45 Orang	32.184.946.307	45 Orang	32.184.946.307	45 Orang	33.019.010.023	45 Orang	33.319.010.023	45 Orang	33.519.010.023	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS	



NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA OPD PENANGGUNG	LOKASI		
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025					TAHUN 2026	
			4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakain Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakain Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	600.000.000	180 Pasang	600.000.000	5 Paket	600.000.000	5 Paket	600.000.000	5 Paket	600.000.000	5 Paket	650.000.000	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS	
			4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	135.000.000	45 Orang	135.000.000	45 Orang	135.000.000	45 Orang	135.000.000	45 Orang	135.000.000	45 Orang	135.000.000	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS	
			4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD yang di fasilitasi	2 Paket	1.900.000.000	100%	1.900.000.000	100%	2.000.000.000	100%	2.100.000.000	100%	2.110.000.000	100%	2.210.000.000	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS	
			4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	2 Paket	1.900.000.000	5 Unit 5 Unit 5 Unit	1.900.000.000	2 Paket	2.000.000.000	2 Paket	2.100.000.000	2 Paket	2.110.000.000	2 Paket	2.210.000.000			
			4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase peningkatan penunjang fungsi dan tupoksi DPRD	100%	42.442.333.662		42.808.820.345		43.506.917.003		44.063.671.736		44.628.252.169		46.050.117.775			
		1. Meningkatkan kualitas produk-produk kedewanan			1. Persentase produk kedewanan yang dihasilkan tepat waktu	100%	18.735.015.662	100%	19.101.502.345	100%	19.594.781.003	100%	19.943.535.736	100%	20.308.116.169	100%	21.199.981.775			
			4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	12 Dokumen	3.433.993.662	12 Dokumen	3.800.480.345	12 Dokumen	4.057.481.003	12 Dokumen	3.996.235.736	12 Dokumen	4.160.816.169	12 Dokumen	4.602.681.775	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS	
			4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	23 Dokumen	3.089.993.662	8 Perda	3.456.480.345	23 Dokumen	3.563.481.003	23 Dokumen	3.502.235.736	23 Dokumen	3.666.816.169	23 Dokumen	4.108.681.775	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS	
			4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 Dokumen	54.000.000	3 Perda inisiatif	54.000.000	12 Dokumen	54.000.000	12 Dokumen	54.000.000	12 Dokumen	54.000.000	12 Dokumen	54.000.000	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS	
			4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	3 Dokumen	100.000.000	8 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	150.000.000	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS	
			4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	150.000.000	8 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	250.000.000	3 Dokumen	250.000.000	3 Dokumen	250.000.000	3 Dokumen	250.000.000	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS	
			4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disediakan	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS	
			4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran yang dihasilkan	2 Dokumen	1.637.042.000	2 Kali	1.637.042.000	2 Kali	1.772.042.000	2 Kali	1.782.042.000	2 Kali	1.782.042.000	2 Kali	1.832.042.000	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS	
			4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	137.042.000	16 Dokumen	137.042.000	2 Dokumen	137.042.000	2 Dokumen	137.042.000	2 Dokumen	137.042.000	2 Dokumen	137.042.000	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS	
			4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	600.000.000	16 Dokumen	600.000.000	2 Dokumen	600.000.000	2 Dokumen	600.000.000	2 Dokumen	600.000.000	2 Dokumen	650.000.000	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS	
			4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	200.000.000	16 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS	
			4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	600.000.000	16 Dokumen	600.000.000	1 Dokumen	600.000.000	1 Dokumen	610.000.000	1 Dokumen	610.000.000	1 Dokumen	610.000.000	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS	
			4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen		0 Laporan	Dokumen	35.000.000	Dokumen	35.000.000	Dokumen	35.000.000	Dokumen	35.000.000		(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS	
			4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	100.000.000	2 kali	100.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS	
			4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan bidang urusan pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	112 Laporan	7.965.000.000	4 Komisi	7.965.000.000	4 Komisi	7.993.278.000	4 Komisi	8.093.278.000	4 Komisi	8.293.278.000	4 Komisi	8.493.278.000	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS	
			4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	28 Laporan	2.000.000.000	420 Kali	2.000.000.000	28 Laporan	2.084.385.000	28 Laporan	2.184.385.000	28 Laporan	2.284.385.000	28 Laporan	2.284.385.000	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS	
			4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	14 Laporan	1.000.000.000	280 Kali	1.000.000.000	14 Laporan	1.074.075.000	14 Laporan	1.074.075.000	14 Laporan	1.074.075.000	14 Laporan	1.174.075.000	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS	
			4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	28 Laporan	2.200.000.000	423 kali	2.200.000.000	28 Laporan	2.148.956.000	28 Laporan	2.148.956.000	28 Laporan	2.148.956.000	28 Laporan	2.148.956.000	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS	

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN,	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA OPD PENANGGUNG	LOKASI					
							TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026								
			4 02 02 2.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		28 Laporan	1.500.000.000	405 kali	1.500.000.000	28 Laporan	1.562.666.000	28 Laporan	1.562.666.000	28 Laporan	1.562.666.000	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS		
			4 02 02 2.03 05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		14 Laporan	1.200.000.000	146 kali	1.200.000.000	14 Laporan	1.022.196.000	14 Laporan	1.122.196.000	14 Laporan	1.222.196.000	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS		
			4 02 02 2.03 06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		2 Dokumen	30.000.000	Nihil	30.000.000	2 Dokumen	33.000.000	2 Dokumen	33.000.000	2 Dokumen	33.000.000	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS		
			4 02 02 2.03 07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran		Dokumen		0%	Dokumen	33.000.000	Dokumen	33.000.000	Dokumen	33.000.000	Dokumen	33.000.000	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS	
			4 02 02 2.03 08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		2 Dokumen	35.000.000	2 Dokumen	35.000.000	2 Dokumen	35.000.000	2 Dokumen	35.000.000	2 Dokumen	35.000.000	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS		
			4 02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD		45 Orang	5.698.980.000	45 Orang	5.698.980.000	45 Orang	5.771.980.000	45 Orang	6.071.980.000	45 Orang	6.271.980.000	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS		
			4 02 02 2.04 01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran		Dokumen			Dokumen		Dokumen	300.000.000	Dokumen	0	Dokumen	0	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS	
			4 02 02 2.04 02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		4 Dokumen	1.100.000.000	45 Orang	1.100.000.000	4 Dokumen	1.100.000.000	4 Dokumen	1.100.000.000	4 Dokumen	1.300.000.000	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS		
			4 02 02 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan		1 Dokumen, 130 Dokumen	2.700.000.000	170 Media	2.700.000.000	1 Dokumen, 150 Dokumen	2.500.000.000	1 Dokumen, 150 Dokumen	2.800.000.000	1 Dokumen, 150 Dokumen	2.800.000.000	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS		
			4 02 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli		27 Orang	500.000.000	100%	500.000.000	27 Orang	550.000.000	27 Orang	550.000.000	27 Orang	550.000.000	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS		
			4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		7 Orang	800.000.000	7 Orang	800.000.000	7 Orang	920.000.000	7 Orang	920.000.000	7 Orang	920.000.000	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS		
			4 02 02 2.04 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		3 Dokumen	563.980.000	9 kali	563.980.000	3 Dokumen	663.980.000	3 Dokumen	663.980.000	3 Dokumen	663.980.000	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS		
			4 02 02 2.04 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		Dokumen	35.000.000	1 kali	35.000.000	Dokumen	38.000.000	Dokumen	38.000.000	Dokumen	38.000.000	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS		
	2. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan				1. Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan		100%	23.707.318.000	100%	23.707.318.000	100%	23.912.136.000	100%	24.120.136.000	100%	24.320.136.000	100%	24.850.136.000		
			4 02 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		3 Kali	17.000.000.000	3 Kali	17.000.000.000	3 Kali	17.200.000.000	3 Kali	17.300.000.000	3 Kali	17.300.000.000	3 Kali	17.600.000.000	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS
			4 02 02 2.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD		1 Laporan	1.900.000.000	45 Orang Anggota DPRD	1.900.000.000	1 Laporan	1.900.000.000	1 Laporan	1.900.000.000	1 Laporan	1.900.000.000	1 Laporan	2.000.000.000	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS
			4 02 02 2.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		45 Dokumen	100.000.000	1 kali	100.000.000	45 Dokumen	300.000.000	45 Dokumen	300.000.000	45 Dokumen	300.000.000	45 Dokumen	300.000.000	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS
			4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		3 Dokumen	15.000.000.000	3 Kali	15.000.000.000	3 Dokumen	15.000.000.000	3 Dokumen	15.100.000.000	3 Dokumen	15.100.000.000	3 Dokumen	15.300.000.000	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS
			4 02 02 2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		1 Kali	937.156.000	1 Kali	937.156.000	1 Kali	1.100.000.000	1 Kali	1.105.000.000	1 Kali	1.205.000.000	1 Kali	1.235.000.000	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS
			4 02 02 2.06 01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Bercara DPRD		2 Laporan	450.000.000	1 Dokumen	450.000.000	2 Laporan	550.000.000	2 Laporan	550.000.000	2 Laporan	650.000.000	2 Laporan	650.000.000	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS
			4 02 02 2.06 02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD		2 Laporan	487.156.000	1 Masa Sid	487.156.000	2 Laporan	550.000.000	2 Laporan	555.000.000	2 Laporan	555.000.000	2 Laporan	585.000.000	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS
			4 02 02 02.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah pelaksanaan Pembahasan Kerja Sama Daerah		3 Kali	115.000.000	3 Kali	115.000.000	3 Kali	117.000.000	3 Kali	120.000.000	3 Kali	120.000.000	3 Kali	120.000.000	(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS



NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN,	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	UNIT KERJA OPD PENANGGUNG	LOKASI				
									TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026											
			4	02	02	02.07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah		3 Dokumen	60.000.000	kali	60.000.000	3 Dokumen	62.000.000	3 Dokumen	65.000.000	3 Dokumen	65.000.000	3 Dokumen	65.000.000		(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS
			4	02	02	02.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun		3 Dokumen	55.000.000	dokumen	55.000.000	3 Dokumen	55.000.000	3 Dokumen	55.000.000	3 Dokumen	55.000.000	3 Dokumen	55.000.000		(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS
			4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah laporan pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD		210 laporan	5.655.162.000	210 laporan	5.655.162.000	210 laporan	5.495.136.000	210 laporan	5.595.136.000	210 laporan	5.695.136.000	210 laporan	5.895.136.000		(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS
			4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Dokumen	100.000.000	135 Kali	100.000.000	Dokumen	110.000.000	Dokumen	110.000.000	Dokumen	110.000.000	Dokumen	110.000.000		(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS
			4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fakta, Alat Keleengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun		Laporan	180.000.000	1 Dokumen	180.000.000	Laporan	280.000.000	Laporan	280.000.000	Laporan	280.000.000	Laporan	280.000.000		(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS
			4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		31 Dokumen	1.350.026.000	36 kali	1.350.026.000	31 Dokumen	1.080.000.000	31 Dokumen	1.080.000.000	31 Dokumen	1.080.000.000	31 Dokumen	1.180.000.000		(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS
			4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		208 Dokumen	4.025.136.000	655 Kali	4.025.136.000	208 Dokumen	4.025.136.000	208 Dokumen	4.125.136.000	208 Dokumen	4.225.136.000	208 Dokumen	4.325.136.000		(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS
			4	02	02	2.08	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus		12 Dokumen	4.025.136.000	655 kali	4.025.136.000	12 Dokumen	4.025.136.000	12 Dokumen	4.125.136.000	12 Dokumen	4.225.136.000	12 Dokumen	4.325.136.000		(SEKRETARIAT DPRD)	KABUPATEN BENGKALIS

# KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

## 7.1 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Kinerja penyelenggaraan urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis yang disajikan berupa target kinerja penyelenggaraan urusan Kesekretariatan selama periode 2021-2026 sebagaimana periode RPJMD dan Renstra PD 2021-2026. Indikator kinerja terdiri atas indikator dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian dari tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk menggambarkan capaian kinerja dari implementasi program perangkat daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis selama periode rencana.

Indikator kinerja dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sejatinya akan menjadi indikator kinerja utama (IKU)

perangkat daerah yang dipertanggungjawabkan oleh kepala Sekretariat DPRD dalam mendukung pencapaian IKU Bupati dan Wakil Bupati selama periode yang sama. Sedangkan indikator kinerja hasil (*outcome*) yang menggambarkan capaian dari implementasi program perangkat daerah Sekretariat DPRD dijadikan sebagai indikator kinerja kunci (IKK) yang akan menjadi bagian dari kinerja yang harus dipertanggungjawabkan para pejabat eselon III lingkup Sekretariat DPRD untuk mendukung pencapaian IKU perangkat daerah.

Indikator ini akan menggambarkan pengelolaan Sekretariat DPRD yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Sehingga pada saat yang sama tergambar bahwa terjadi peningkatan kinerja Sekretariat DPRD yang semakin baik. Selengkapnya target-target capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis untuk periode 2021-2026 yang akan datang disajikan pada tabel 7.1. berikut ini.

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan  
Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis 2021-2026

NO	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Indikator kinerja yang disajikan merupakan alat ukur dalam penilaian capaian yang dikehendaki dari implementasi program perangkat daerah. Dalam tabel 7.1. tersebut, terdapat lima indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah (Nomor 1 s/d 5),

Penyajian indikator yang terakhir adalah dalam rangka pengkajian dan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan.

## B A B

## 8

## PENUTUP

### 8.1. Kesimpulan

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi dan misi serta kebijakan lainnya dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis dalam 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan serta kerangka pendanaan berikut unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis.

Renstra disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan peran Sekretariat DPRD sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Daerah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Sekretariat DPRD tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan.

Tujuan dan sasaran, maupun program/kegiatan dalam Renstra ini, tidak boleh menjadi sekumpulan niat baik saja. Oleh karena itu penting bagi Sekretariat DPRD

untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaannya, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengoordinasikan setiap elemen Perangkat Daerah untuk secara bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat.

## **8.2. Kaidah Pelaksanaan**

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 disusun melalui berbagai tahapan yakni persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan diakhiri dengan penetapan setelah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra PD telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh penetapan. Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Renstra PD, Sekretariat DPRD melaksanakan Renstra menjadi pedoman unit kerja di lingkungan PD dalam menyusun rancangan Renja setiap tahun.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

1. Renstra Sekretariat DPRD akan diimplementasikan dengan konsisten dengan mematuhi asas-asas pemerintahan umum yang berlaku.
2. Pelaksanaan Renstra PD ini merupakan tanggung jawab penuh dari Kepala Sekretariat DPRD, dimana bersama dengan Kepala Bappeda, Kepala Sekretariat DPRD melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra ini.
3. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Sekretariat DPRD dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
4. Pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD dilakukan melalui Renja Sekretariat DPRD setiap tahun dan realisasinya melalui DPA Sekretariat DPRD setiap tahun.
5. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Sekretariat DPRD tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Sekretariat DPRD dalam mencapai sasaran Renstra.

6. Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Sekretariat DPRD diperlukan adanya perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja tahun rencana atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kabupaten Bengkalis dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.
7. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini harus mampu mendorong keterlibatan *stakeholder* pembangunan.